

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Tidak hanya dipemerintahan pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada didaerah tersebut. Dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau *stakeholder*, terutama transparansi kepada masyarakat (Maysaroh, 2018).

Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas atau organisasi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik atau masyarakat. Pemerintah harus mampu untuk menghasilkan atau menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan UU No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa suatu laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para penggunanya atau *stakeholder* (Windiastuti, 2013).

Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam pasal 31 UU No.17 disebutkan bahwa Gubernur/walikota/bupati harus menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada DPRD yaitu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar atau alat untuk pengambilan keputusan. Oleh karenanya, informasi yang terkandung di dalam suatu Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) harus dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Huang *et al* (1999) dikutip dalam Xu *et al* (2003) menyatakan bahwa sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dijadikan dasar atau pendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh penggunanya. Karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan serta menganalisa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Nurillah, 2014).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan informasi yang dikutip oleh peneliti dari portal berita online *Skalabraknews.com* pada tanggal 2 Juli 2018, diketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk tahun anggaran 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2008 Kabupaten Lampung Timur selalu gagal mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga laporan keuangan Pemerintah daerah Lampung Timur tidak dapat diberikan predikat opini (Disclaimer) dari BPK. Opini Disclaimer tersebut dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK nomor 62/HP/XVIII.BLP/12/2011 tertanggal 31 Desember 2011.

Diketahui pada tahun 2017 dibawah kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan provinsi Lampung, oleh karena itu Bupati Chusnunia Chalim optimis menargetkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun anggaran 2018. Akan tetapi pada kenyataannya dibawah kepemimpinan Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) gagal diraih oleh pemerintah

Lampung Timur dan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan tahun 2018. Menurut pengakuan Plt Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhori penyebab kegagalan kabupaten Lampung Timur mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah karena terdapat beberapa catatan yang sama dengan kabupaten/kota lain perihal aset yang dikelola oleh kabupaten saat ini yaitu SLTA baik SMA/SMK, dan terdapat beberapa catatan aset saat pemekaran dari kabupaten induk Lampung Tengah. (*sumber :<http://skalabraknews.com>*).

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan sebuah opini yang diberikan kepada pemerintah baik tingkat provinsi/kota/kabupaten yang telah menyajikan laporan keuangan yang berisi informasi secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Perihal defisit atau tidaknya keuangan suatu pemerintahan, hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam pemberian opini oleh BPK asalkan seluruh data atau informasi mengenai laporan keuangan pemerintah diungkapkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan pemerintah yaitu :

Pertama, dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip atau dasar akuntansi yang harus diterapkan oleh pemerintahan dalam proses penyusunan laporan keuangan guna memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu syarat wajib yang harus diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan agar pemerintah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Maysaroh, 2018).

Kedua, Peran auditor internal yang ada di suatu pemerintahan. Peran internal auditor pemerintah adalah sebagai pengawas internal disuatu pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2008 peran internal auditor ialah melakukan pengawasan intern, yaitu keseluruhan proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan atau pemerintah dalam mewujudkan pertanggungjawabannya (Sari, 2014).

Ketiga, pemahaman serta pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Penyusunan laporan keuangan yang mengandung informasi yang baik bermula dari proses pengumpulan data dan pencatatan transaksi-transaksi yang telah dilakukan selama periode akuntansi yang berlaku. Sampai dengan tahap akhir yaitu pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau terkomputerisasi (Permendagri No.59 tahun 2007).

Keempat, sumberdaya manusia yang kompeten yang dimiliki oleh pemerintahan. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik Organisasi Perangkat Daerah harus memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan, serta sering mengikuti pelatihan dan pendidikan akuntansi agar sumberdaya manusia yang ada dibagian keuangan suatu dinas dapat memahami logika akuntansi dengan baik agar mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Warisno dikutip dari penelitian Windiastuti (2013) kegagalan sumberdaya manusia pemerintah daerah dalam memahami serta menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan data atau informasi dalam laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di suatu dinas sebagai fasilitas penunjang untuk proses penyusunan laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam sistem aplikasi akuntansi berbasis komputer pada pemerintah daerah sangat penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah selama proses menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif, efisien, dan ekonomis (Maysaroh, 2018).

Keenam, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang ada disuatu pemerintahan memberikan keyakinan akan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu untuk meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, serta memudahkan proses audit laporan keuangan tersebut. Tingginya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data laporan keuangan tersebut menjadi tidak relevan (Maysaroh, 2018).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Meidiana (2017) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya dan adanya penambahan variable independen yaitu kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Alasan penambahan variabel tersebut adalah merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyebutkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Masih sedikitnya penelitian tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang menjadikan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai objek penelitian dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu inilah yang menarik peneliti untuk menganalisis dan meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Studi Empiris Pada OPD Pemerintah Kabupaten Lampung Timur)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini membahas apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, peran auditor internal, pemanfaatan SAKD, kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur ?
2. Apakah peran auditor internal berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur?
3. Apakah pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur?

4. Apakah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur?
6. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur?

1.4 Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk membuktikan secara empiris peran auditor internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Untuk membuktikan secara empiris pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Untuk membuktikan secara empiris kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Untuk membuktikan secara empiris pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Untuk membuktikan secara empiris sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Akademisi : Dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah, peran auditor internal,

pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Praktisi : Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengimplementasian laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, akuntabilitas dan transparan.
3. Stakeholder : Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengoptimalan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terbagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut merupakan sistematika dalam penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, dimana di dalamnya terdapat identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori yang terkait pada penelitian ini. Yaitu sebagai dasar permasalahan yang akan diteliti, serta menjelaskan kerangka pemikiran yang berisi keseluruhan kegiatan penelitian mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap penyelesaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijabarkan tentang tempat, waktu, metode penelitian, populasi, sampel, jenis data, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan serta menganalisis data hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan kesimpulan yang berisikan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Dan disertai dengan saran-saran yang disimpulkan dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

